

# Tinjauan Ekonomi Indonesia

## Triwulan IV – 2001

**Bobby Hamzar Rafinus**  
**Komara Djaja**

### PENDAHULUAN

Dalam triwulan III 2001 perekonomian Indonesia mengalami masa 'bulan madu' pemerintahan baru Megawati dan Hamzah Haz. Nilai tukar rupiah menguat dengan cepat begitu terdapat sinyal Presiden Abdurrahman Wahid mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Berbagai kalangan juga memuji pilihan personil kabinet Gotong Royong yang diumumkan sebulan setelah Megawati dan Hamzah Haz dilantik. Komposisi tim ekonomi dalam Kabinet Gotong Royong oleh sementara orang disebut sebagai *the dream team*.

Bagaimana kinerja ekonomi makro dalam triwulan IV akan merupakan pokok bahasan tinjauan kali ini, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, moneter, dan keuangan negara, serta pelaksanaan restrukturisasi hutang swasta. Pembahasan perkembangan ekonomi internasional disampaikan pada bagian awal. Pada bagian akhir disampaikan ulasan mengenai arah baru strategi pengurangan kemiskinan, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2002.

### A. PERKEMBANGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Memasuki triwulan IV-2001 siklus penurunan laju pertumbuhan ekonomi dunia makin dalam. Melemahnya permintaan akan produk teknologi informatika semakin luas dirasakan oleh beberapa negara eksportir teknologi tinggi, khususnya di kawasan Asia Timur. Namun demikian gambaran perekonomian yang suram tersebut berbeda derajatnya di berbagai belahan negara.

Khusus di Asia Timur, beberapa negara seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan diperkirakan mengalami penurunan laju

pertumbuhan lebih besar daripada negara lain karena menurunnya ekspor produk industri informatika. Namun demikian perekonomian negara-negara ini relatif stabil karena tingkat kesejahteraan penduduknya sudah relatif tinggi, manajemen perekonomiannya solid, dan fundamental ekonominya juga kuat.

Kekhawatiran akan terjadinya dampak yang buruk dari perlambatan ekonomi dunia justru pada lima negara yang mengalami krisis pada tahun 1997 dan 1998, yaitu Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kelima negara ini akan tetap tumbuh sekitar 1 hingga 3 persen untuk tahun 2001. Stabilitas ekonomi lima negara ini akan banyak dipengaruhi oleh proses demokrasi politik yang sedang berlangsung, khususnya pada era pemerintahan baru di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Dalam konjungtur perekonomian yang rendah peran Cina yang ukuran PDBnya mencapai 60 persen PDB Asia Timur, penting untuk diamati khususnya setelah Cina berhasil diterima sebagai anggota WTO. Peran Cina cenderung semakin besar dalam komposisi modal portofolio, penanaman modal asing, dan perdagangan di kawasan Asia Timur. Selain sebagai kompetitor, Cina juga merupakan potensi pasar ekspor yang besar bagi negara-negara tetangganya.

Peristiwa runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) di *New York* pada tanggal 11 September 2001 akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris telah menyebabkan turunnya kepercayaan akan cepat pulihnya perekonomian Amerika Serikat dan negara-negara maju dari situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat sejak awal 2001. Beberapa sektor seperti pariwisata, penerbangan, dan pasar modal diperkirakan semakin lambat pertumbuhannya hingga tahun 2002. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan negatif dari triwulan III - 2001 hingga triwulan I - 2002.

Konjungtur ekonomi dunia setelah terjadinya serangan WTC menjadi tidak pasti dan beresiko besar karena beberapa alasan. *Pertama*, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang meluas di banyak negara melemahkan dukungan terhadap kegiatan ekonomi global. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan ekonomi global terhadap gejolak, dan memperbesar resiko perlambatan yang akibatnya sulit diperkirakan karena kaitan ekonomi antar-negara yang rumit. *Kedua*, perlambatan

pertumbuhan ekonomi akan memberikan tekanan pada sektor keuangan dan dunia usaha, khususnya di Jepang dimana perbankanya didominasi oleh pasar obligasi dan pasar saham. Ketiga, meskipun negara berkembang memperoleh manfaat dari rendahnya tingkat bunga, namun kondisi sumber pembiayaan global belum menentu seperti tercermin pada krisis keuangan yang melanda Argentina dan Turki.

## B. PEREKONOMIAN INDONESIA

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2001 perekonomian Indonesia diperkirakan mencatat pertumbuhan yang relatif baik dibandingkan kebanyakan negara. Permintaan pasar domestik yang besar dapat mengkompensasi penurunan permintaan pasar global.

Tabel 1  
*Laju Pertumbuhan Ekonomi Lima Negara Asia Timur*

	1998	1999	2000	2001*
Indonesia	-13,1	0,8	4,8	3,4
Korea Selatan	-6,7	10,9	8,8	2,7
Malaysia	7,4	6,1	8,3	0,8
Philipina	-0,6	3,4	4,0	3,0
Thailand	-10,8	4,2	4,3	1,2

\* perkiraan

Sumber: Institute for Developing Economies, Economic Outlook for East Asia 2002

Perkembangan PDB menurut pengeluaran menunjukkan turunnya peran konsumsi masyarakat dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 1999, sektor ini yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat nol persen dari titik minus 13,13 persen pada tahun 1998. Pada tahun 2000, menurunnya peran konsumsi masyarakat tersebut dapat diimbangi dengan meningkatnya ekspor dan investasi. Selama tiga triwulan tahun 2001 konsumsi masyarakat cenderung menurun, namun diperkirakan meningkat pada triwulan keempat. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi masyarakat tercatat 5,94 persen selama triwulan I-2001 hingga triwulan III -2001 dibanding periode yang sama tahun 2000.

Sementara itu pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) cenderung melambat pertumbuhannya pada tahun 2001. Jika pada triwulan I masih tumbuh 10,2 persen dibanding triwulan sebelumnya, maka pada triwulan kedua dan ketiga turun sebesar minus 1,36 persen dan minus 7,60 persen. Sebagai akibat perlambatan tersebut pertumbuhan investasi tahunan pada triwulan III 2001 kembali negatif sejak triwulan III 1999. Perlambatan pertumbuhan investasi antara lain tercermin dari merosotnya penjualan semen dan impor barang modal.

Ekspor yang merupakan andalan pertumbuhan pada tahun 2000, sangat mengecewakan kinerjanya selama tahun 2001. Pertumbuhan ekspor non migas melambat minus 6 persen dan ekspor migas minus 2,8 persen selama periode Januari – September 2001 dibandingkan periode yang sama tahun 2000. Pertumbuhan ini diperkirakan akan lebih melambat lagi hingga akhir tahun 2001, terutama dengan terjadinya tragedi WTC.

Menurunnya ekspor juga diikuti dengan melemahnya impor. Selama tiga triwulan tahun 2001 impor migas menurun minus 5,9 persen sedangkan impor nonmigas tumbuh 10,2 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh menurun dibanding tahun 2000 yang masing-masing mencapai 73,5 persen dan 22,9 persen. Pada impor nonmigas perlambatan diperkirakan terjadi terutama pada impor barang modal sejalan dengan melemahnya kegiatan investasi.

**Tabel 2**  
*Laju Pertumbuhan Berantai Komponen PDB Menurut Penggunaan*

Jenis Penggunaan	Q4-2000	Q1-2001	Q2-2001	Q3-2001
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,7	4,8	0,16	3,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,1	6,0	2,35	1,43
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,8	10,2	-1,36	-7,60
Ekspor Barang dan Jasa	14,2	11,7	4,13	-7,13
Impor Barang dan Jasa	44,2	34,1	-5,36	-14,87

*Sumber:* BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Berita Resmi Statistik, November 2001

Sedangkan perkembangan PDB menurut sektor produksi menunjukkan semua sektor mengalami pertumbuhan positif selama tiga triwulan 2001 dibanding periode yang sama tahun 2000. Pertumbuhan terbesar dicatat

oleh sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2000, maka tercatat pertumbuhan negatif terjadi pada sektor pertanian yang disebabkan oleh penurunan produksi pada subsektor tanaman bahan makanan.

Pertumbuhan PDB secara kumulatif sampai dengan triwulan III sebesar 3,3 persen, yang sedikit meningkat dibanding triwulan II : 3,2 persen dan triwulan I : 3,1 persen. Dalam triwulan IV diperkirakan terjadi peningkatan pada sisi konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah dengan adanya perayaan hari-hari besar nasional dan berakhirnya tahun anggaran pemerintah. Dengan asumsi tersebut dan perkembangan sosial politik yang kondusif diperkirakan secara keseluruhan PDB pada tahun 2001 sekitar 3,3 hingga 3,5 persen.

Sejalan dengan pola sumber pertumbuhan sisi penggunaan, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan lebih tinggi dari sektor lain pada sisi penawaran dalam triwulan IV-2001 dibanding triwulan III-2001. Sementara itu pada sektor produksi, seperti sektor pertanian dan industri pengolahan diperkirakan relatif stabil tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya. Pada sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan terjadi penurunan sebagai akibat penghentian usaha PT Timah.

**Tabel 3**  
*Laju Pertumbuhan PDB Menurut Sektor*

Lapangan Usaha	Trw III-2001 thd.Trw II- 2001	Trw III-2001 thd.Trw III- 2000	Trw I-III 2001 thd.Trw I-III 2000
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan	4,68	-0,08	0,87
Pertambangan dan penggalian	1,62	0,15	0,01
Industri pengolahan	2,46	5,29	4,58
Listrik, gas dan air bersih	2,47	8,93	8,72
Bangunan	1,99	3,35	1,62
Perdagangan, hotel dan restoran	2,03	5,39	5,48
Pengangkutan dan komunikasi	2,73	6,77	6,70
Keuangan, persewaan, dan jasa persh.	0,58	2,44	2,66
Jasa-jasa	0,79	2,26	1,73
PDB	2,38	3,47	3,30

Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Berita Resmi Statistik, November 2001

## 2. Perkembangan Moneter

Perkembangan moneter yang menonjol adalah menguatnya nilai tukar rupiah pada awal triwulan III. Pengalihan pemerintahan Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri yang berlangsung melalui Sidang Istimewa MPR menumbuhkan optimisme baru akan prospek ekonomi Indonesia, dari masyarakat luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini antara lain tercermin dari perbaikan peringkat utang jangka panjang Indonesia dari "negatif" menjadi "stabil" oleh Standard & Poor's pada akhir Juli 2001.

Selain itu di dalam negeri, nilai tukar rupiah menguat tajam dari Rp11.440,- per USD pada akhir Juni 2001 menjadi sekitar Rp9.500,- dan Rp8.860,- pada akhir Juli dan Agustus 2001. Kegairahan melakukan transaksi juga terjadi di pasar modal, seperti tercermin dari nilai transaksi di Bursa Efek Jakarta yang hampir mencapai dua kali lipat pada bulan Juli 2001 dibanding Juni 2001.

Optimisme tersebut nampaknya tidak berumur panjang, karena pada akhir September perkembangan indikator tersebut berbalik arah. Nilai tukar rupiah kembali melemah menjadi Rp9.695,- per USD, dan nilai transaksi di pasar modal juga menurun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pembalikan arah ini, antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama, seperti Jepang dan Amerika Serikat, mendorong sebagian perusahaan mulai mengurangi kegiatan produksinya. Hal ini semakin terasa setelah adanya tragedi WTC pada pertengahan September 2001.

Memasuki triwulan IV nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai nilai terendah Rp10.925,- per US dollar pada tanggal 5 Nopember 2001. Namun selanjutnya rupiah kembali cenderung menguat dan ditutup pada posisi Rp10.400 per US dollar pada akhir tahun 2001. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan valuta asing menjelang akhir tahun dan sentimen positif yang bersumber dari komitmen pinjaman CGI dan kesepakatan terhadap *Letter Of Intent* antara Pemerintah Indonesia dan IMF. Dengan demikian selama triwulan IV-2001 nilai tukar rupiah melemah sebesar 6,6 persen.

Pada sisi sektor keuangan terdapat sinyal yang menggembirakan dari perkembangan posisi likuiditas rupiah bank umum yang meningkat relatif cepat selama triwulan III-2001 dari Rp595,3 triliun pada akhir Juni

2001 menjadi Rp609,9 triliun pada akhir September 2001. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan tumbuh secara perlahan dan pasti meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut nampaknya menghadapi tantangan yang berat karena masih relatif cepatnya laju perkembangan jumlah uang kartal. Pertumbuhan uang kartal mencapai 21,5 persen (y-o-y) hingga September 2001. Tingkat pertumbuhan uang kartal ini hanya sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22,4 persen.

Pertumbuhan uang kartal yang relatif cepat inilah yang menyebabkan jumlah uang primer sering berada di atas target indikatif kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF. Sebagai contoh pada bulan Agustus 2001 jumlah uang primer melonjak menjadi Rp115,7 triliun. Sementara itu target indikatif uang primer yang ditetapkan dalam LOI adalah sebesar Rp110,5 triliun untuk September 2001. Hal inilah yang mendorong Bank Indonesia aktif melakukan operasi pasar terbuka dan menaikkan tingkat bunga SBI untuk menyerap likuiditas di masyarakat.

Tingkat bunga SBI 1 bulan naik dari 16,55 persen pada Juni 2001 menjadi 17,57 persen pada September 2001. Sementara itu tingkat bunga SBI 3 bulan dalam periode yang sama naik dari 16,28 persen menjadi 17,56 persen. Kenaikkan tingkat bunga SBI tampak diperlukan agar pelelangan SBI dapat menyerap dana masyarakat lebih dari 90 persen target. Pola ini disadari oleh Bank Indonesia dapat memberikan sinyal yang kurang tepat bagi pembentukan tingkat suku bunga di perbankan. Oleh karena itu sejak triwulan III, pelelangan SBI 1 bulan tidak selalu diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga.

Selain itu BI telah menegaskan bahwa kebijakan tingkat suku bunga diarahkan pada penciptaan tingkat bunga riil yang positif. Kebijakan ini memberikan orientasi yang lebih jelas pada pentingnya pengendalian tingkat inflasi. Sebelum penegasan kebijakan ini, BI dianggap menaikkan tingkat bunga tanpa arah yang jelas sehingga menyulitkan sektor usaha. Hal ini menunjukkan perubahan sikap Bank Indonesia yang lebih akomodatif untuk mengurangi dampak negatif tingkat bunga terhadap upaya pemulihan ekonomi.

Berapa tingkat bunga riil yang wajar? Jika diamati perkembangan tingkat bunga nominal SBI 1 bulan yang cenderung dipertahankan sejak triwulan III-2001 maka tingkat bunga riil yang wajar berkisar antara 4 persen hingga 6 persen. Tingkat bunga riil SBI juga berada pada kisaran tersebut dalam periode sebelum krisis. Sedangkan pada perbankan, baik deposito maupun kredit, tingkat bunga riilnya lebih tinggi pada masa sebelum krisis. Sebagai contoh pada akhir tahun 1996, tingkat bunga riil deposito 3 bulan sebesar 10,78 persen dan tingkat bunga riil kredit sebesar 12,74 persen. Pada September 2001 kedua tingkat bunga riil tersebut masing-masing sebesar 3,16 persen dan 6,06 persen.

Mengingat *country-risk* Indonesia yang lebih tinggi dalam periode krisis ini, maka seyogyanya tingkat bunga riil lebih tinggi dari yang tercapai pada triwulan III-2001. Hal ini dapat ditempuh dengan menaikkan tingkat bunga nominal atau menurunkan tingkat inflasi. Dalam tahun 2002 mendatang tampaknya harus diupayakan penurunan inflasi karena tingkat bunga nominal diharapkan sudah menurun agar sektor usaha semakin aktif memanfaatkan kredit perbankan.

Penyaluran kredit perbankan dalam rupiah secara bertahap terus meningkat selama tiga triwulan tahun 2001. Jika pada akhir tahun 2000 jumlahnya Rp152,5 triliun maka pada akhir September 2001 mencapai Rp187,9 triliun. Sementara kredit dalam valas dalam periode tersebut tidak banyak berubah berkisar sekitar Rp116 triliun. Dengan demikian posisi volume kredit mencapai sekitar Rp304 triliun. Pertambahan kredit tercatat dalam jumlah besar pada sektor industri manufaktur, sektor industri jasa, dan lain-lain. Jika dilihat dari jenis kreditnya, maka sebagian besar merupakan kredit modal kerja. Debitur perorangan dan perusahaan swasta merupakan peminjam kredit terbesar. Meskipun pertumbuhan kredit sudah mulai meningkat, namun baru sebagian merupakan kredit baru. Hal ini terkait dengan belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Belum optimalnya fungsi perbankan juga terlihat dari masih rendahnya pertumbuhan volume simpanan. Volume simpanan rupiah hanya meningkat 7,2 persen selama tiga triwulan tahun 2001. Keseluruhan volume simpanan rupiah pada tahun 2001 diperkirakan pertumbuhannya tidak berbeda dengan tahun 2000 yang mencapai 12,8 persen. Tingkat pertumbuhan ini masih jauh dari kondisi sebelum krisis ekonomi yang sering mencapai di atas 20 persen. Sementara itu volume



simpanan valas, dihitung dalam dollar AS, justru menurun sebesar 10,2 persen. Laju penurunan volume simpanan valas lebih cepat pada golongan pemilik bukan penduduk daripada golongan pemilik penduduk. Hal ini menunjukkan faktor di luar kondisi perbankan masih relatif menghambat fungsi intermediasi perbankan.

### 3. Realisasi Anggaran Tahun 2001

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Nopember tahun 2001 menunjukkan peningkatan anggaran pada sisi pendapatan maupun belanja negara dibandingkan rencana. Pada sisi pendapatan negara diperkirakan terjadi realisasi 4,8 persen lebih tinggi dari APBN-Penyesuaian dan 13,9 persen lebih tinggi dari APBN 2001 (UU nomor 35 tahun 2000). Peningkatan realisasi pendapatan terutama berasal dari peningkatan bukan pajak sebesar 14,3 persen, khususnya dari penerimaan gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Dari penerimaan pajak dalam negeri diperkirakan terjadi peningkatan realisasi dari Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan pada sisi belanja negara, realisasi keseluruhan mencapai 4,2 persen di atas APBN-Penyesuaian dan 12,2 persen di atas APBN (UU nomor 35 tahun 2000). Mata anggaran yang meningkat realisasinya terutama anggaran belanja pemerintah pusat, khususnya anggaran belanja rutin. Peningkatan realisasi anggaran belanja yang mempertimbangkan kenaikan anggaran penerimaan, diperkirakan tetap menghasilkan realisasi defisit anggaran sebesar yang direncanakan yaitu 3,7 persen PDB.

Pembiayaan defisit tersebut berasal dari dalam negeri sebesar 3 persen PDB dan dari luar negeri sebesar 0,7 persen PDB. Komposisi ini berbeda dari yang direncanakan semula (UU nomor 35 tahun 2000) yaitu 2,4 persen dari dalam negeri dan 1,3 persen dari luar negeri. Kenaikan pembiayaan dari dalam negeri terutama diperoleh dari perbankan sebesar 0,5 persen PDB disamping peningkatan hasil penjualan asset program restrukturisasi perbankan dan hasil penerbitan obligasi pemerintah. Sedangkan penurunan sumber pembiayaan luar negeri terjadi pada penarikan pinjaman, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Sementara pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri meningkat 16,4 persen.

#### 4. Pelaksanaan Restrukturisasi Hutang Swasta dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi

Program restrukturisasi perbankan dan dunia usaha dimaksudkan untuk mengembalikan potensi yang ada pada dunia usaha. Krisis ekonomi, yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan dunia usaha hanya menggunakan sebagian kapasitas terpasangnya khususnya pada tahun 1998 dan 1999 karena kesulitan keuangan. Beban pembayaran hutang yang tiba-tiba membengkak karena lonjakan depresiasi rupiah bukan saja mengurangi dana operasional perusahaan namun juga modal perusahaan. Untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan perusahaan, maka upaya restrukturisasi pinjaman merupakan pilihan pertama. Dengan upaya ini perusahaan tetap dapat berusaha dan secara bertahap mengembalikan pinjamannya.

Dari hasil survei Satgas Prakarsa Jakarta periode Oktober 2001<sup>1</sup> terlihat meningkatnya kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman, terutama pada sektor produksi barang dan jasa konsumsi, sektor keuangan dan investasi, serta sektor industri pada umumnya. Hal ini tercemin dari meningkatnya porsi debitur dari sektor tersebut yang memilih restrukturisasi kreditnya dengan membayar tunai atau membayar kewajiban pembayaran hutang yang tertunda (*debt buybacks*) dan penjadwalan hutang (*debt rescheduling*). Meningkatnya kemampuan pembayaran hutang tersebut menunjukkan sudah mulai pulihnya pemakaian kapasitas produksi.

Hal tersebut juga terungkap dari hasil Survei Prakarsa Jakarta yang menemukan sekitar 20 perusahaan telah melakukan restrukturisasi hutang secara mandiri, tanpa melalui BPPN maupun Prakarsa Jakarta. Pada umumnya perusahaan tersebut bergerak pada industri jasa konsumsi. Jumlah hutang yang direstrukturisasi selama periode Oktober 1998 hingga September 2001 mencapai sekitar USD 2 miliar. Sebagian besar hutang tersebut direstrukturisasi dengan skim penjadwalan hutang, disamping *debt to equity*, *cash payment*, dan *debt write off*.

Pada sektor yang lain, seperti infrastruktur dan industri tekstil, kemampuan membayar hutangnya relatif rendah. Hal ini diperkirakan

---

1 The Jakarta Initiative Task Force, Presentation on Corporate Debt Survei, October 2001

terkait dengan begitu besarnya beban pembayaran pinjaman yang diperoleh sebelum masa krisis sehingga skim konversi hutang dengan *equity* dan konversi hutang dengan *convertible bond* lebih dipilih. Khusus untuk industri tekstil, kondisi ekonomi eksternal yang memburuk dalam tahun 2001 dan kesulitan memperoleh *letter of credit* diperkirakan banyak mengurangi kinerjanya.

Survei Prakarsa Jakarta juga mengungkapkan bahwa pada umumnya sektor usaha yang memiliki prospek ekonomi lebih baik memilih masa tenor restrukturisasi hutang yang lebih pendek. Perusahaan pada sektor barang konsumsi, keuangan dan investasi, dan perumahan serta hotel memilih masa pengembalian pinjaman 3 hingga 5 tahun. Sedangkan perusahaan di sektor pertanian, konstruksi, infrastruktur, logam, dan pertambangan lebih menyukai masa pengembalian pinjaman 7 hingga 10 tahun.

Dari paparan hasil survei Prakarsa Jakarta tersebut di atas terlihat adanya hubungan timbal balik yang erat antara restrukturisasi hutang dengan kinerja perusahaan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang berkinerja baik tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban restrukturisasi hutangnya. Sementara itu perusahaan yang tidak berkinerja baik memerlukan bantuan BPPN dan Prakarsa Jakarta

Studi internal Bappenas<sup>2</sup> mengungkapkan bahwa tingkat hutang perusahaan akan menurun secara lambat apabila skim restrukturisasi hutang hanya terbatas penjadwalan hutang (*debt rescheduling*). Dengan memberikan peluang skim *debt write-downs*, seperti *hair cuts*, akan menurunkan tingkat hutang perusahaan lebih cepat. Semakin cepat turun tingkat hutang akan memungkinkan perusahaan memulai akumulasi dana investasi untuk selanjutnya melakukan peningkatan produksi.

Studi Bappenas dan Survei Prakarsa Jakarta memberikan dukungan akan perlunya pelaksanaan kebijaksanaan *hair cut* agar pertumbuhan ekonomi segera pulih. Kebijakan ini sudah ditempuh oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2000. Hasil dari kebijaksanaan ini sulit untuk

---

2 Bappenas, *The Waiting Game Corporate Debt Restructuring in Indonesia, Internal Report*, 2000

dijelaskan secara agregat karena besarnya pengaruh faktor ekonomi makro, khususnya tingkat bunga dan nilai tukar rupiah, terhadap restrukturisasi hutang perusahaan. Namun demikian informasi sektor yang berkinerja baik dalam restrukturisasi hutang dari hasil survei Prakarsa Jakarta nampaknya sejalan dengan data sementara pertumbuhan ekonomi hingga triwulan ketiga tahun 2001.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencatat nilai tambah yang terus meningkat selama periode 2000 hingga triwulan III – 2001. Demikian pula dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini mungkin dapat menjadi indikasi bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit perusahaan di sektor-sektor tersebut telah memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian hal ini belum dapat mengindikasikan bahwa restrukturisasi perusahaan pada sektor lain yang nilai tambahnya berfluktuasi tidak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penjelasan kasus per kasus perusahaan yang mengikuti program restrukturisasi hutang BPPN atau Prakarsa Jakarta dapat mengungkapkan masalah ini.

Hasil survei Prakarsa Jakarta periode Oktober 2001 berikut ini mungkin dapat memberikan tambahan informasi. Survei terhadap 18 perusahaan yang telah dimediasi Prakarsa Jakarta proses restrukturisasi hutangnya memberikan penjelasan beragam mengenai kemampuannya membayar bunga pinjaman. Empat perusahaan belum punya kewajiban membayar, sebelas perusahaan mampu membayar, dan tiga perusahaan tidak mampu membayar. Perusahaan yang tidak mampu membayar pinjaman memberikan alasan sebagai berikut:

1. Kurangnya permintaan domestik dan luar negeri atas produksinya;
2. Menurunnya harga barang produksinya;
3. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan membengkaknya pembayaran pinjaman dalam denominasi USD;
4. Rencana bisnis tidak bisa berjalan karena gangguan stabilitas keamanan dan politik.

Dari penjelasan ini hasil survei ini terlihat bahwa pelaksanaan restrukturisasi hutang memerlukan dukungan iklim ekonomi dan non-ekonomi yang kondusif agar segera terlihat hasilnya dalam wujud pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Disamping berbagai faktor makro tersebut, ada beberapa masalah kelembagaan proses restrukturisasi hutang perusahaan yang perlu penyempurnaan. *Pertama* adalah implementasi Undang-undang Kepailitan yang belum efektif mendorong restrukturisasi perusahaan. *Kedua*, mekanisme restrukturisasi hutang di luar pengadilan belum mempengaruhi debitur untuk melakukan negosiasi dengan kreditur. *Ketiga*, sejumlah kebijakan BPPN secara tidak langsung menghambat penyelesaian hutang swasta, karena BPPN kini merupakan kreditur terbesar bagi debitur Indonesia. *Keempat*, perlunya partisipasi swasta melalui bank umum maupun unit restrukturisasi hutang perusahaan akan mempercepat penyelesaian hutang ini.<sup>3</sup>

### C. Perkiraan Perkembangan Ekonomi Tahun 2002

Berbagai lembaga internasional memperkirakan ekonomi dunia yang melambat sejak 2001 akan mulai pulih pada semester II-2001 dengan bangkitnya kembali investasi sektor teknologi informasi. Pengembangan semi konduktor generasi baru mendorong industri teknologi informasi melakukan investasi pada pengadaan mesin dan peralatan lainnya. Selain itu dampak ekonomi dari serangan teroris terhadap *World Trade Center* juga secara bertahap telah diatasi secara bertahap oleh pemerintahan George Bush.

Industri teknologi informasi di Korea Selatan diperkirakan telah mempersiapkan memanfaatkan momentum pengembangan semi konduktor generasi baru dengan investasi peralatan yang lebih agresif dibandingkan Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Dengan basis industri teknologi informasi yang ada, Korea Selatan akan lebih cepat melakukan ekspor semi konduktor ini sehingga pertumbuhan diperkirakan mencapai 4,1 persen. Sementara ketiga negara lainnya diperkirakan berkisar di bawah 3 persen untuk tahun 2002.<sup>4</sup>

Sementara itu kombinasi pertumbuhan kelima negara ASEAN, Indonesia – Filipina – Thailand – Malaysia – dan Vietnam, diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun 2002 yaitu 3,5 persen dibanding 2,5 persen pada tahun 2001. Dari kelima negara tersebut Vietnam mencatat

3 Bappenas, *The Waiting Game Corporate Debt Restructuring in Indonesia, Internal Report*, 2000

4 Institute for Developing Economies, *East Asian Economic Outlook 2002*, Tokyo, 2002

pertumbuhan tertinggi yaitu 7,2 persen, dan Thailand yang terendah yaitu 2,1 persen. Tiga negara lainnya diperkirakan tumbuh berkisar antara 3,5 persen hingga 4 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 banyak dipengaruhi oleh perkembangan global dan kondisi sosial ekonomi dalam negeri. Apabila ekonomi dunia masih resesi sepanjang tahun dan kondisi sosial tidak bergejolak, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 3 persen. Sedangkan apabila ekonomi dunia sudah mulai cepat pertumbuhannya dalam tahun 2002 dan kondisi sosial kondusif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh dengan 4 persen.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran diperkirakan berasal dari sektor pertanian antara 1,9 persen dan 2,0 persen, sektor industri pengolahan sekitar 4,7 persen dan 5,0 persen, sedangkan sektor perdagangan tumbuh sekitar 4,8 persen dan 4,9 persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan PDB tahun 2002 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Kebijaksanaan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2002 akan difokuskan pada upaya mensukseskan pelaksanaan anggaran tahun 2002, khususnya mencapai defisit anggaran sebesar 2,5 persen PDB. Sementara itu, pada kebijakan moneter akan diupayakan untuk mengurangi laju inflasi di bawah 10 persen hingga akhir tahun 2002. Selain itu pemerintah Indonesia juga menyatakan akan terus melanjutkan upaya reformasi yang memberikan pengaruh pada stabilitas ekonomi makro, seperti reformasi sektor keuangan, privatisasi dan pemulihan asset, serta masalah hukum dan pengelolaan pemerintahan.

Salah satu langkah penting yang akan diambil dalam tahun 2002 adalah upaya mendapatkan penjadwalan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang lebih rendah melalui Paris Club untuk kewajiban yang jatuh tempo pada periode April 2002 hingga Desember 2003. Permintaan ini didasarkan pada perkiraan perkembangan neraca pembayaran yang kurang menggembirakan pada periode tersebut karena pertumbuhan ekspor yang masih lemah, sementara impor tetap meningkat untuk memenuhi permintaan domestik, dan arus modal keluar masih tetap terjadi meskipun diharapkan semakin kecil dengan perbaikan iklim investasi.

Upaya penjadwalan pembayaran hutang tersebut diharapkan juga mengurangi tekanan pada pelaksanaan anggaran tahun 2002. Selain itu juga dilakukan langkah-langkah lain untuk menciptakan keseimbangan antara prioritas konsolidasi hutang pemerintah dengan kebutuhan penyediaan dana yang memadai untuk kegiatan sosial yang berprioritas tinggi. Hal ini tercermin juga pada (i) meningkatnya penerimaan pajak bukan migas sebesar 1,2 persen; (ii) tidak ada kenaikan gaji pegawai; (iii) mengurangi subsidi dengan menaikkan harga minyak dan listrik; (iv) menetapkan Dana Alokasi Umum sebesar 25 persen dari penerimaan domestik.

Untuk mencapai target peningkatan penerimaan bukan migas, Pemerintah merencanakan empat kegiatan untuk memperkuat administrasi perpajakan. Langkah tersebut yaitu intensifikasi pemungutan pada pembayar pajak besar, penyempurnaan sistem dan prosedur pembayaran pajak melalui bank mulai Juli 2002, rencana pelaksanaan audit tahunan pada Maret 2002, dan adanya target dan ukuran kinerja untuk pemungutan pajak terhutang. Pada bidang bea cukai, pemerintah akan mengeluarkan rencana peningkatan prosedur dan administrasi pada bulan Juni 2002.

Penghapusan subsidi energi akan dilaksanakan sebagai bagian penting dari upaya memfokuskan kembali prioritas pengeluaran dan konsolidasi fiskal jangka menengah. Setelah pengurangan sebesar 0,8 persen PDB pada tahun 2001, pemerintah bertujuan mengurangi lagi subsidi energi sebesar 2,8 persen hingga ke tingkat 1,8 persen PDB pada tahun 2002. Untuk mencapai sasaran ini, harga minyak domestik akan dinaikkan rata-rata 30 persen mulai Januari 2002. Pemerintah akan mengupayakan mekanisme skim kompensasi kenaikan harga minyak untuk masyarakat miskin yang semakin memadai. Pertamina sedang mengambil langkah penanggulangan penyelundupan minyak dan mengurangi konsumsi minyak domestik guna mengamankan penghematan anggaran tahun 2002, termasuk melalui pengetatan pengawasan dan monitoring pengiriman ke area-area yang beresiko tinggi.

Dengan uraian rencana kebijakan fiskal yang begitu rinci untuk tahun 2002 sebagaimana tersebut dalam LOI, menjadi tantangan bagi tim ekonomi Kabinet Gotong Royong untuk merealisasikannya bersama dengan seluruh unsur masyarakat. Hal ini mungkin tercapai apabila

perhatian dan upaya masyarakat terfokus pada kegiatan ekonomi, bukan lagi tersita untuk masalah keamanan dan politik. Jika kondisi ini tidak dapat tercipta, maka tidak salah apabila tim ekonomi Kabinet Gotong Royong disebut *the dreaming team*.

#### **D. ARAH BARU STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN**

Dalam CGI 2001 awal Nopember 2001 yang lalu terdapat perbedaan yang cukup menonjol dibanding CGI sebelumnya dengan diangkatnya tema *Working Together to Reduce Poverty*. Berangkat dari tema tersebut, topik pembahasan tidak saja terbatas pada masalah ekonomi, namun juga masalah kesejahteraan sosial, hukum, keamanan, dan politik. Cakupan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak lagi menjadi sasaran dari kegiatan sektor tertentu namun menjadi kerangka kerja seluruh sektor.

Konsep pengurangan kemiskinan yang bersifat komprehensif tersebut diuraikan pada publikasi Bank Dunia yaitu "Indonesia - The Imperative for Reform" dan "Indonesia - Constructing a New Strategy for Poverty Reduction". Kesadaran bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi upaya bersama timbul dari membengkaknya proporsi jumlah penduduk miskin selama empat tahun krisis ekonomi, yaitu dari 15,7 persen tahun 1996 menjadi 27,1 persen tahun 1999 dan 15,2 persen tahun 2000. Jika dihitung dalam jumlah penduduk miskin menjadi 30,3 juta jiwa tahun 1996, 54,3 juta jiwa tahun 1999, dan 30,9 juta jiwa tahun 2000.

Selain didorong oleh perkembangan jumlah penduduk miskin di dalam negeri, faktor perhatian dunia internasional terhadap pengurangan kemiskinan juga menonjol. Dalam menghadapi milenium baru, abad 21, pertemuan para pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB tahun 2000 (*the United Nations Millenium Summit for 2000*) menghasilkan kesepakatan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan masalah internasional yang perlu dihadapi bersama. Jumlah penduduk miskin dunia, yang berpendapatan kurang dari 1 dollar AS mencapai 1,2 miliar jiwa, akan secara bersama-sama diupayakan berkurang menjadi separuhnya pada tahun 2015.

Dengan adanya momentum ini, strategi pengurangan kemiskinan tidak lagi berpijak pada kegiatan langsung kepada masyarakat namun



pada formulasi kebijakan makro. Untuk itu beberapa negara sudah mengembangkan *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP). Penyusunan PRSP ini pada umumnya dilakukan oleh negara yang tergabung dalam *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) agar memperoleh kemudahan hutang dari lembaga donor multilateral.

Pada tataran ekonomi makro disampaikan bahwa terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi pengurangan kemiskinan. Dalam rangka mencapai kedua hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah terciptanya fiskal yang berkelanjutan dan rasio hutang pemerintah yang menurun dalam jangka menengah. Hutang pemerintah yang relatif besar perlu dikelola dengan tepat agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi.

Pada Sidang CGI kali ini Pemerintah Indonesia memperoleh komitmen pinjaman sebesar 3,14 miliar dolar AS yang terkait dengan anggaran dan 575 juta dolar AS merupakan hibah yang tidak terkait dengan anggaran. Sekitar 1,3 miliar USD dari jumlah pinjaman tersebut penggunaannya terkait dengan kemajuan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan dituntutnya kesungguhan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program tersebut. ■